



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-22.KP.03.03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Memperhatikan : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1065/KASN/4/2020 tanggal 3 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU: . . .

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



*(Handwritten signature)*  
YASOMNA H. LAOLY

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p.d. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
6. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
7. Direktur Jenderal Imigrasi;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
10. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : M.HH-22.KP.03.03 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 9 APRIL 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. IMAM JAUHARI, M.H. NIP. 196308231992031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	Drs. THOLIB, S.H., M.H. NIP. 196308111988111001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	sda.
3.	Drs. MARASIDIN, Bc.I.P., M.H. NIP. 196404251990011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Inspektur Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal	sda.
4.	MHD. JAHARI SITEPU, S.H., M.Si. NIP. 196410081993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	sda.
5.	HERMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 197010161992031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal	sda.
6.	SUCIPTO, S.H., M.H., M.Kn. NIP. 197103251999031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	sda.
7.	HAJERATI, S.H., M.H. NIP. 196303091992032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	Direktur Informasi Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H. NIP. 196803041991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
9.	ALFI ZHRIN, Bc.I.P., S.Sos., M.H. NIP. 196102261983031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	sda.
10.	ABDUL KARIM, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. NIP. 196907121995031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	sda.
11.	THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.I.P., S.H., M.Hum. NIP. 196210181986031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin	sda.
12.	PUJO HARINTO, Bc.I.P., S.Sos. M.Si. NIP. 196703311990011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	sda.
13.	Dr. SUBIANTA MANDALA, S.H., LL.M. NIP. 196308021991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	sda.
14.	NGATIRAH, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 196307091988122001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	sda.
15.	YAYAN INDRIANA, S.H., M.Si. NIP. 196407051989031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	sda.

1	2	3	4	5	6
16.	Dr. SYARIFUDDIN, S.T., M.H. NIP. 197112182002121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY